



#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

ASN DINSOS
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berakhlak | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan terbaik, Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, kerabatnya, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas segala petunjuk dan kemurahan-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini akhirnya dapat terselesaikan. Renja ini disusun sebagai dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Tasikmalaya dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Demikian laporan ini kami susun dan Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini belum dapat sepenuhnya sempurna, oleh karena itu saran konstruktif untuk penyempurnaan rencana kerja pada tahun mendatang sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Tasikmalaya, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN
NIP. 19670325 198710 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024, perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Sosial Kota Tasikmalaya berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Kerja Pembangunan Daerah pada Tahun Berkenaan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun. Renja PD Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja Dinas Sosial bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perubahan disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat Program, Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (Sampai

dengan TW II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 8. Permendagri Nomor 13 tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perda Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 nomor 70)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Perda Kota Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikalaya Tahun 2008 Nomor 83);

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
20. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
24. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 000.7.2.4/Kep. 53 – Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
25. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.10.1-Bappelitbangda Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan adanya penambahan anggaran yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk :

1. Sebagai Landasan penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Sosial.
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun berjalan.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
4. Sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang peraturan pendapatan dan belanja daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- A. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4. BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan momenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Di tahun 2024 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melaksanakan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.209.420.900 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Di Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni:

1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Pada triwulan II Tahun 2024, anggaran pada Sasaran I dialokasikan sebesar Rp. 17.910.910.300, dan anggaran pada sasaran II sebesar Rp. 5.298.510.600.

Evaluasi yang dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, terdiri dari 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.209.420.900 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan Anggaran sebesar Rp. 5.298.510.600 melaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 60.000.000, outcome kinerja yaitu Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (7 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 7 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 3.953.010.600, outcome kinerja yaitu Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP dengan Target Capaian (66 Dokumen), dimana perhitungan outcome kinerja dilakukan (Penjumlahan dokumen dari 2 Sub-Kegiatan);
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Rp. 22.620.000, outcome kinerja yaitu Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 4.500.000, outcome kinerja yaitu Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 Sub-Kegiatan yang dilaksanakan dibagi 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 193.690.420, outcome kinerja yaitu Persentase Administrasi Umum yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (9 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 9 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 768.709.980, outcome kinerja yaitu Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 295.979.600, outcome kinerja yaitu Persentase Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (4 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 4 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

II. Program Pemberdayaan Sosial

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.045.000.000, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, outcome kegiatan ini yakni Persentase PSKS yang diberdayakan dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (4 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 4 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

III. Program Rehabilitasi Sosial

Dengan anggaran sebesar Rp. 13.081.521.500, melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan , Pengemis di Luar Panti sosial, outcome kegiatan ini yakni persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (12 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 12 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, outcome kegiatan ini yakni Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja

dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (5 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 5 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dengan anggaran sebesar Rp. 925.000.000, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan data fakir miskin, cakupan daerah kabupaten/kota, outcome kegiatan ini yakni Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

V. Program Penanganan Bencana

Dengan anggaran sebesar Rp. 825.000.000, melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, outcome kegiatan ini yakni Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, outcome kegiatan ini yakni Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana dengan target kinerja (100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 1 dengan target kinerja (100%);

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, outcome kegiatan ini yakni Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan target kinerja

(100%), dimana rumus perhitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

Adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	3	4	7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
DINAS SOSIAL													
1	DINAS SOSIAL				23.209.420.900		5.875.603.422	7.450	5.968.670.072	43.666	11.844.273.494	51,64	51,03
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				23.209.420.900		5.875.603.422	7.450	5.968.670.072	43.666	11.844.273.494	51,64	51,03
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.298.510.600	25,59	1.632.342.891	10	963.384.386	281	2.595.727.277	40,87	48,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	60.000.000	56,17	37.230.250	0	-	132	37.230.250	56,17	62,05
1	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	30.000.000	2	27.590.250			2	27.590.250	100	92
1	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	Dokumen	5.000.000	60	4.820.000			60	4.820.000	100	96

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30	Dokumen	5.000.000		-			-	-	0	-
1	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	70	Dokumen	5.000.000	70	4.820.000			70	4.820.000	100	96
	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	70	Dokumen	5.000.000		-			-	-	-	-
	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	5.000.000		-			-	-	-	-
1	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	5.000.000		-			-	-	-	-

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	3.953.010.600	16,67	1.272.456.925	5	772.472.391	44,44	2.044.929.316	44,44	51,73
1	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.948.510.600	3	1.272.456.925	5	772.472.391	8	2.044.929.316	57,14	51,79
	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	%	22.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	18.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-
	1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	193.690.420	44,56	84.195.706	45	20.200.900	60,35	104.396.606	60,35	53,90
1	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4.500.000	5	4.498.000		-	5	4.498.000	100	99,96
1	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Waktu Pelaksanaan	10	Paket	11.831.000	3	3.204.000	2	2.622.500	5	5.826.500	50	49
1	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5.000.000	1	979.000	4	1.357.800	5	2.336.800	50,00	46,74
1	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	13.000.000		-	1	826.000	1	826.000	10,00	6,35
1	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	4.416.000		-	15	4.347.800	15	4.347.800	100,00	98,46
1	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dokumen	14.500.000	5	2.980.000	5	2.960.000	10	5.940.000	50,00	40,97
1	1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15	Paket	14.546.500	6	4.433.200	4	3.004.000	10	7.437.200	66,67	51,13

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Laporan	19.042.600	12	3.966.700	14	5.082.800	26	9.049.500	52,00	47,52
	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	106.854.320	95	64.134.806	-		95	64.134.806	63,33	60,02
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	768.709.980	40,54	162.259.983	10	107.820.445	25	270.080.428	67,57	35,13
1	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	Laporan	5.000.000	10	2.930.000	4	1.500.000	14	4.430.000	93,33	88,60
1	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	70.000.000	2	11.515.074	3	15.096.570	5	26.611.644	50,00	38,02
1	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	693.709.980	3	147.814.909	3	91.223.875	6	239.038.784	50,00	34,46
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	295.979.600	21,21	76.200.027	12	62.890.650	19	139.090.677	57,58	46,99
1	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	118.117.900	2	38.371.702	1	18.459.250	3	56.830.952	60	48,11

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	164.395.200	5	37.828.325	3	33.685.400	8	71.513.725	53	43,50
1	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	5.100.500		-	5	2.380.000	5	2.380.000	50	46,66
	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	8.366.000		-	3	8.366.000	3	8.366.000	100	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												40,87	35,69
Predikat Kinerja												SR	SR
					-								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.045.000.000		278.501.200	-	129.513.790	91	408.014.990	73,98	39,04
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100	%	1.045.000.000	73,98	278.501.200	-	129.513.790	91	408.014.990	73,98	39,04
1	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	69	Orang	103.000.000	69	26.827.450		22.800.000	69	49.627.450	100	48,18

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	44.000.000	10	6.000.000		12.958.000	10	18.958.000	100	43,09
1	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Lembaga	810.000.000	12	233.073.750		77.225.890	12	310.299.640	30	38,31
1	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Sertifikat	88.000.000		12.600.000		16.529.900	-	29.129.900	-	33,10
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												73,98	39,04
Predikat Kinerja												S	SR
					-								
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				15.075.910.300		3.534.229.531	7.114	4.554.596.146	11.232	8.088.825.677	69,80	53,65
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia		100	%	7.449.625.000	2275	925.364.702	3.337	2.662.910.196	5.612	3.588.274.898	54,19	48,17

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												
1	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	9455	Orang	2.949.625.000	2064	638.191.350	3125	968.183.700	5.189	1.606.375.050	54,88	54,46
	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	28	Orang	20.000.000		-		-	-	-	-	-
	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	141	Orang	485.000.000	18	44.105.600	123	428.728.500	141	472.834.100	100,00	97,49
	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Orang	10.000.000		-		-	-	-	-	-

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	60.000.000	13	6.750.000		-	13	6.750.000	17,33	11,25
	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Orang	30.000.000		-		-	-	-	-	-
	1.06.04.2.01.0007 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	2.500.000		-		-	-	-	-	-

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
1	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	20	Orang	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	
1	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	319	Orang	370.000.000	160	156.465.552	9	19.193.500	169	175.659.052	52,98	47,48
1	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	96	Orang	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
1	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	184	Orang	3.500.000.000	20	79.852.200	80	1.246.804.496	100	1.326.656.696	54,35	37,90
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100	%	7.626.285.300	28,01	2.608.864.829	3.777	1.891.685.950	5.620	4.500.550.779	85,41	34,50

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	280	Orang	4.044.388.800	145	1.999.952.329	-	145	1.999.952.329	51,79	49,45	
1	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6065	Orang	2.411.896.500	1698	608.912.500	3712	5.410	2.128.010.500	89,20	88,23	
1	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	124	Orang	1.070.000.000	-	65	372.587.950	65	372.587.950	52,42	34,82	
1	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											69,80	41,33	
Predikat Kinerja											S	SR	
					-								
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				925.000.000	109.693.000	35	186.963.650	31.341	296.656.650	50,76	32,07	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100	%	925.000.000	10,93	109.693.000	35	186.963.650	31.341	296.656.650	50,76	32,07
1	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	79	Orang	200.000.000	10	11.345.200	35	52.060.650	45	63.405.850	56,96	31,70
2	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	61460	Keluarga	350.000.000	6696	28.256.700	24520	85.254.700	31.216	113.511.400	50,79	32,43
3	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	375.000.000	40	70.091.100	40	49.648.300	80	119.739.400	40,00	31,93
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,76	32,07	
Predikat Kinerja											R	SR	

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				825.000.000	87	319.969.800	191	130.739.300	621	450.709.100	64,40	54,63
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100	%	545.000.000	40,96	201.442.000	181	88.444.300	591	289.886.300	59,04	53,19
1	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	616	Orang	320.000.000	248	118.345.000	150	78.029.200	398	196.374.200	64,61	61,37
1	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	385	Orang	225.000.000	162	83.097.000	31	10.415.100	193	93.512.100	50,13	41,56
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100	%	280.000.000	46,51	118.527.800	10	42.295.000	30	160.822.800	69,77	57,44
1	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43	Orang	280.000.000	20	118.527.800	10	42.295.000	30	160.822.800	69,77	57,44
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												64,40	55,31
Predikat Kinerja												R	R

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				40.000.000		867.000	100	3.472.800	100	4.339.800	10,00	10,85
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	1000		40.000.000	0	867.000	100	3.472.800	100	4.339.800	10,00	10,85
1	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1000	Makam	40.000.000		867.000	100	3.472.800	100	4.339.800	10	11
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												10,00	10,85
Predikat Kinerja												SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												51,64	39,87
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												R	SR

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem SIPD membantu pekerjaan yang ada pada bidang – bidang di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan, pengendalian, dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang di ampu. Namun disisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu Kesalahan input koding pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga memerlukan waktu dan permohonan kembali dibukanya sistem untuk pergeseran koding pada sistem, selain itu juga terhambatnya kegiatan karna keterbatasan anggaran kas yang ada di Pemerintah Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial
2. Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya

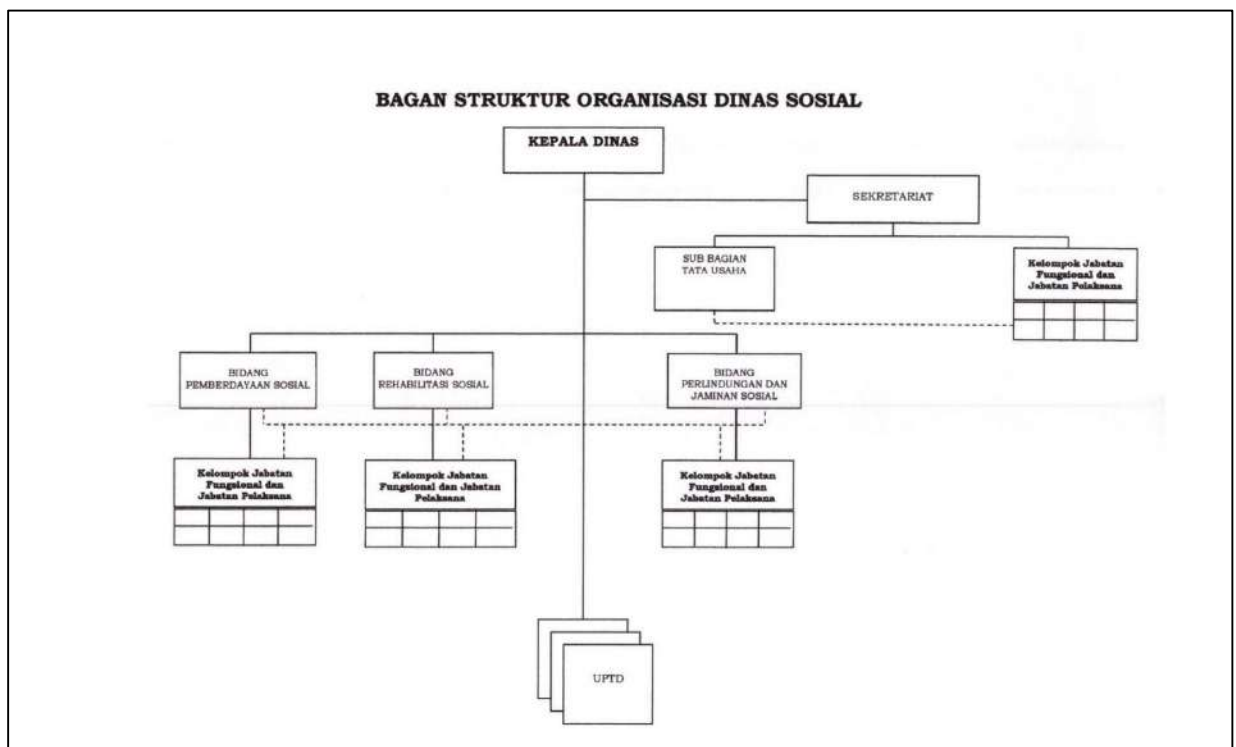
No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	Target Renstra Dinas Sosial				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS (%)		100%	100%	100%	100%	99,87%	99,87%	100%	100%
2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Capaian Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Capaian SAKIP perangkat Daerah		BB (72)	BB (73)	BB (75)	BB (80)	BB (72,06)	BB (72,06)	BB (74,61)	BB (75)
7	Capaian IKM Perangkat Daerah		B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)	B (88,25)	B (88,25)	B (88,25)	B (88)

2.2.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Sosial

Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- f. UPTD

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial



2.2.2 Uraian Tugas

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. Menyenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. Merumuskan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Menyenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Menyenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan

Dinas;

- f. Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan

- administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. Menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
 - h. Mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;

- d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pepembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional Bidang Sekretariat meliputi antara lain:

1) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Analis Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kepegawaian;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Perencana Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. Menyenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;

- c. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Mengoordinasikan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- e. Menyelenggarakan upaya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial Meliputi :

1) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat).

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan

kelembagaan masyarakat;

- e Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
 - f Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
 - g Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
 - h Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan ketahanan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan serta pengelolaan taman makam pahlawan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- f. Melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin;
- d. Melaksanakan pengembangan jaminan dan perlindungan sosial;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan bencana meliputi perlindungan sosial bagi korban bencana

serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- g. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan perlindungan sosial. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Perlindungan Sosial;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang

- berkaitan dengan tugas Kegiatan Perlindungan Sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan jaminan sosial. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Jaminan Sosial;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin tingkat Kota;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat rentan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Jaminan Sosial;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja

Bidang Rehabilitasi Sosial;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS;
- d. Mengoordinasikan upaya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- e. Menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Antara lain:

- 1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia serta Gelandangan Pengemis). Dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial

serta bimbingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- g. Melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- h. Menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- g. Melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- h. Menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa yang akan datang . Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan strategi untuk menindaklanjuti factor-faktor penghambat dan memanfaatkan factor-faktor pendorong atau isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Belum optimalnya akselerasi reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005 – 2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan, dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

T.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, dengan 1 (Satu) sasaran :

S.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

T.2 Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Berbasis Kearifan Lokal, yang Terdiri dari 5 (Lima) Sasaran :

S.2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

S.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

S.4 Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;

S.5 Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni, dan budaya daerah;

S.6 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

T.3 Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran :

S.7 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

S.8 Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

T.4 Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (Dua) sasaran :

- S.9 Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas;
- S.10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

T.5 Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (Satu) sasaran:

- S.11 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 Persen	5.577.522.793	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 Persen	5.577.522.793
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	60.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Jumlah pelaporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	66 Dokumen	4.232.522.793	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Jumlah pelaporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	66 Dokumen	4.232.522.793
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan	5 Dokumen	23.120.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan	5 Dokumen	23.120.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
			laporan barang milik daerah					laporan barang milik daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	260.124.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	260.124.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	655.258.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	655.258.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan pemeliharaan	100 Persen	336.497.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tasikmalaya	Persentase pemenuhan pemeliharaan	100 Persen	336.497.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase PSKS Aktif	100 Persen	785.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase PSKS Aktif	100 Persen	785.000.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase PSKS yang di berdayakan	100 Persen	785.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase PSKS yang di berdayakan	100 Persen	785.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 Persen	5.155.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 Persen	5.155.000.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Tasikmalaya	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang	100 Persen	1.655.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Tasikmalaya	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang	100 Persen	1.655.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tasikmalaya	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	3.500.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tasikmalaya	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	3.500.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	800.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tasikmalaya	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	800.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	100 Persen	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	100 Persen	800.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tasikmalaya	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	450.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tasikmalaya	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	450.000.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial	100 Persen	300.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial	100 Persen	300.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap		Persentase pemberdayaan masyarakat	100 Persen	150.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap		Persentase pemberdayaan masyarakat	100 Persen	150.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		terhadap kesiapsiagaan Bencana			Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		terhadap kesiapsiagaan Bencana		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	40.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	40.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tasikmalaya	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	40.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial, sehingga Dinas Sosial Kota Tasikmalaya membantu Walikota dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya dengan menjalankan program- program yang ada di Dinas Sosial.

Adapun untuk usulan program maupun kegiatan masyarakat dilaksanakan pada kegiatan Musrenbang tingkat Dinas berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untu memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) antara lain:

- 1. Terwujudnya Penanganan Bagi PPKS
- 2. Terwujudnya Pemberdayaan Sosial
- 3. Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Yang kemudian dirubah sesuai dengan Arsitektur Kinerja yang berlaku pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024, antara lain :

- 1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Tasikamalaya.

Sebagai bahan perbandingan, Tujuan pada Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Penanganan PMKS		Persentase Capaian Penanganan PMKS	100	%
		Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS	100	%
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap PMKS	Capaian Jaminan Sosial Terhadap PMKS	100	%
			Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	100	%
2	Terwujudnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Pemberdayaan Sosial	100	%
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	100	%
		Meningkatnya Pemeliharaan Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai – Nilai Kepahlawanan	100	%

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pada Dinas Sosial
Sesuai dengan Arsitektur Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Penanganan PPKS dan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan	1. Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	Persen (%)
2	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Soial	1. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	B	Kategori

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program dan kegiatan sebanyak 14 (Empat belas) yang didukung oleh 56 (Lima Puluh Enam) sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - A. Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - II. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - III. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - IV. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
 - V. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
 - VI. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - VII. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - I. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - II. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - I. Pengamanan barang milik daerah
 - II. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - I. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
 - E. Administrasi umum Perangkat Daerah
 - I. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - II. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - III. Penyediaan rumah tangga
 - IV. Penyediaan bahan logistik kantor
 - V. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - VI. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - VII. Penyediaan bahan/material

- VIII. Fasilitas kunjungan tamu
- IX. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I. Penyediaan jasa surat menyurat
- II. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- III. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- II. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
- III. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- V. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota

- I. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
- II. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/kota
- III. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
- IV. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti

- I. Penyediaan pemakanan
- II. Penyediaan sandang

- III. Penyediaan alat bantu
- IV. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- V. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- VI. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
- VII. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
- VIII. Pemberian akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
- IX. Pemberian layanan data dan pengaduan
- X. Pemberian layanan kedaruratan
- XI. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- XII. Pemberian layanan rujukan
- B. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar panti social
 - I. Pemberian layanan kedaruratan
 - II. Penyediaan pemakanan
 - III. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
 - IV. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - V. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - A. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota
 - I. Pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota
 - II. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota
 - III. Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - A. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota
 - I. Penyediaan makanan
 - II. Penyediaan sandang

- B. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
 - I. Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan taruna siaga bencana
- 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 - A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - I. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, antara lain pada misi ke 3 (tiga), yaitu; mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial, sehingga Dinas Sosial Kota Tasikmalaya membantu Walikota dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya dengan menjalankan program- program yang ada di Dinas Sosial.

3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Perubahan Kerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 23.784.420.900,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	19	20
						Dinas Sosial				12.807.522.793,00	20.857.510.600,00	23.784.420.900,00		13.852.285.590,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.807.522.793,00	20.857.510.600,00	23.784.420.900,00		13.852.285.590,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.807.522.793,00	20.857.510.600,00	23.784.420.900,00		13.852.285.590,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.577.522.793,00	5.298.510.600,00	5.398.510.600,00		6.245.785.590,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	66 Dokumen	66 Dokumen	4.232.522.793,00	3.953.010.600,00	3.953.010.600,00		4.067.377.050,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29/12 Orang/bulan	29/14 Orang/bulan	4.227.522.793,00	3.948.510.600,00	3.948.510.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.061.877.050,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan laporan barang milik daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	23.120.000,00	22.620.000,00	22.620.000,00		25.542.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.042.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun										
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	260.124.800,00	193.690.420,00	193.690.420,00		291.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	11.831.000,00	11.831.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	20.000.000,00	14.546.500,00	14.546.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	25.124.800,00	19.042.600,00	19.042.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	150.000.000,00	106.854.320,00	106.854.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	655.258.200,00	768.709.980,00	768.709.980,00		1.322.366.540,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	580.258.200,00	693.709.980,00	693.709.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.234.366.540,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	336.497.000,00	295.979.600,00	295.979.600,00		467.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	129.500.000,00	118.117.900,00	118.117.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	179.000.000,00	164.395.200,00	164.395.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.197.000,00	5.100.500,00	5.100.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	17.800.000,00	8.366.000,00	108.366.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Aktif	100 Persen	100 Persen	785.000.000,00	1.045.000.000,00	1.115.000.000,00		863.500.000,00		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Psks yang di berdayakan	100 Persen	100 Persen	785.000.000,00	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00		863.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	69 Orang	100.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	40 Lembaga	550.000.000,00	810.000.000,00	880.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	605.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)										
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Sertifikat	4 Sertifikat	95.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.500.000,00	DINAS SOSIAL	
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 Persen	100 Persen	5.155.000.000,00	12.724.000.000,00	15.296.910.300,00		5.320.700.000,00		
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	1.655.000.000,00	7.344.000.000,00	7.344.000.000,00		1.459.700.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3665 Orang	9455 Orang	985.000.000,00	2.844.000.000,00	2.910.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.083.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	28 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	107 Orang	141 Orang	255.000.000,00	485.000.000,00	535.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang	7 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	75 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	11 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak											
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	70 Orang	10 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.750.000,00	DINAS SOSIAL		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	20 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.750.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	319 Orang	70.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.700.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	192 Orang	96 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan										
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	184 Orang	200.000.000,00	3.500.000.000,00	3.690.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.500.000,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	3.500.000.000,00	5.380.000.000,00	5.380.000.000,00		3.861.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	503 Orang	30 Orang	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	4.044.388.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.255.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	6065 Orang	280.000.000,00	2.160.000.000,00	2.431.896.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	308.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	119 Orang	124 Orang	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.188.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA										
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	11 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00		880.000.000,00		
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00		880.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	79 Orang	79 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	70678 Keluarga	61460 Keluarga	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	825.000.000,00	1.009.000.000,00		495.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial	100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	545.000.000,00	545.000.000,00		330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan										

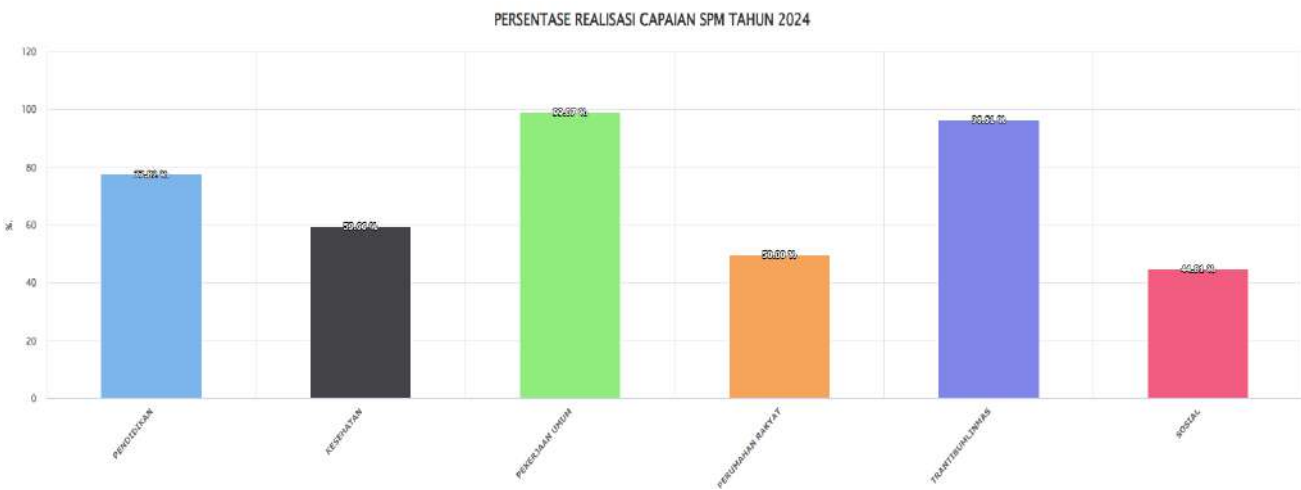
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	480 Orang	616 Orang	150.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang	385 Orang	150.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masayarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00		165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	43 Orang	150.000.000,00	280.000.000,00	464.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		47.300.000,00		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		47.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1000 Makam	1000 Makam	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	J U M L A H							12.807.522.793,00	20.857.510.600,00	23.784.420.900,00		13.852.285.590,00				

3.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagian besar mengacu pada Visi dan Misi Dinas, yang sebagian berisikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Grafik 3.1 dan Grafik 3.2

Grafik 3.1
Grafik Persentase Realisasi Capaian SPM
Sampai Dengan Triwulan II



Grafik 3.2
Persentase Realisasi Anggaran SPM Untuk Setiap Bidang



Dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa persentase realisasi Capaian SPM sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mencapai 44,81% dan Persentase realisasi

anggaran untuk setiap bidang terutama pada bidang sosial mencapai 52,75%.

Selain pencapaian yang telah di realisasikan sampai dengan Triwulan II ini terdapat juga Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan SPM, Permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Permasalahan, Kendala, dan Solusi SPM
Pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

NO	PERMASALAHAN	KENDALA	SOLUSI	KETERANGAN
1	Pencapaian Target Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum maksimal	Belum memadainya sarana dan prasarana terutama tempat penampungan pengungsi	Mengajukan bantuan sarana dan prasarana yang refresentatif terkait relokasi program pasca bencana kabupaten/kota	Selama ini untuk penampungan hanya mengandalkan tenda bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang diberikan ketika pandemi Covid terjadi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Tasikmalaya dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 lingkup Dinas Sosial, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tasikmalaya, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN

NIP. 19670325 198710 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 800/ Kep.124 /Sekre

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan, sinkronisasi dan sinergitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
- MENGINGAT** :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Menetapkan Nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu, yang tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dari Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada **Diktum kesatu dan kedua**, sesuai program dan kegiatan antara lain :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan Pelaksanaan Format Pelaporan dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Menyiapkan Format Pelaporan Dokumen Rencana Kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Awal Laporan Dokumen Rencana Kerja;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 01 Juni 2023



**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA**

HENDRA BUDIMAN R, S.Pi.,MP
NIP. 19711207 200312 1 003

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 800/ Kep. 124 /Sekre

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung jawab : HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA, S.Pi., M.P.
- Ketua : NANA, S.IP
- Sekretaris : SANI NURUL ISMA, SE.,MM.
- Anggota : Hj. MASWATI, S.IP.,M.Si.
- H. ANDIS SALAHUDIN, S.IP.,M.Si.
- INDAH NALI HATI,SP.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA



HENDRA BUDIMAN R, S.Pi.,MP
NIP 19711207 200312 1 003